

Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

T Heru Nurgiansah

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Email: nurgiansah@upy.ac.id

ABSTRAK

Sepanjang tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat segala tatanan kehidupan mengalami perubahan yang sangat signifikan termasuk bidang politik dan bidang pendidikan. Pemerintah tetap bersikeras melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember saat wabah Corona belum mereda yang membuat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sleman semakin menurun. Hal ini berbanding terbalik di bidang pendidikan, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembelajaran jarak jauh dengan dalih untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sleman dalam pemilihan umum di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literasi. Observasi dilaksanakan di 17 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan terhadap petugas Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sleman sangat baik di tengah-tengah wabah serta fungsi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, diuji ketangguhannya dalam membangun partisipasi politik masyarakat di masa pandemi. Indikator sangat baik ditunjukkan dari angka pemilih yang lebih besar dari pada angka golput, yakni 549.044 suara pemilih berbanding 126 suara golput.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Covid-19; Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

Throughout 2020, Indonesia faces a Covid-19 pandemic that has made all living settings undergo significant changes including political and educational fields. The government insisted on carrying out the election of the Regional Head on December 9 when the Corona outbreak had not subsided which made the political participation of the people in Sleman Regency decreased. This is inversely proportional to the field of education, where the government issued a policy in the form of distance learning under the pretext of breaking the link of the spread of the virus. The purpose of this research is to find out the political participation of the people of the Sleman Regency in the general election during the Covid-19 Pandemic. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interview, documentation, and literacy. Observations were conducted in 17 subdistricts spread across Sleman Regency. Interviews were conducted with officers of the Electoral Commission and the people of Sleman. The results of this study showed that the political participation of the people of Sleman Regency is very good in the midst of the outbreak and the function and role of Citizenship Education as a political education, tested its toughness in building community political participation in the pandemic. The indicator is very good indicated by the larger turnout than the golput number, which is 549,044 electoral votes compared to 126 golput votes.

Keywords: Political Participation; Covid-19; Citizenship Education.

PENDAHULUAN

Pada akhir 2019 bermula dari China, sebuah virus menyebar dengan cepat ke seantero negeri termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri awal mula virus Corona terkonfirmasi keberadaannya sejak bulan Maret 2020 dan terus berlangsung sampai saat ini, sehingga PBB menjadikan Corona sebagai pandemi. Adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan banyak negara berada dalam situasi krisis yang hebat (Januar Mahardhani, 2020). Krisis tersebut menyasar seluruh sendi-sendi kehidupan tanpa bisa dikendalikan. Bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata benar-benar luluh lantak diterjang wabah yang sampai sekarang sudah menjangkit lebih dari 40 juta jiwa di seluruh dunia. Wabah ini membuat Indonesia mengerahkan segala cara dan kekuatan untuk tetap berdiri kokoh di saat negara lain mulai kewalahan. Jika salah menentukan kebijakan yang tepat maka akan berdampak buruk pada ketahanan dan kedaulatan Negara. Kebijakan yang akurat dalam penanganan pandemi ini merupakan salah satu cara pertahanan nasional Indonesia. Pertahanan nasional adalah suatu usaha atau kemampuan yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mempertahankan sebuah kedaulatan bangsa agar tetap eksis saat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan melanda sebuah negara (Krisnawati et al., 2020).

Pandemi covid-19 mengakibatkan segala kehidupan global berubah (Nurgiansah & Sukmawati, 2020). Pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia khususnya di bidang politik. Sistem politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang menuntut warga negaranya untuk selalu berpartisipasi aktif secara bermutu sebagai bagian dari *to be good citizen* (Atmaja et al., 2020). Dengan adanya wabah ini maka partisipasi aktif warga negara Indonesia bergeser dari partisipasi langsung menjadi partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berarti turut serta dalam politik

praktis seperti mencalonkan diri dalam pemilihan atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon tertentu. Sedangkan partisipasi tidak langsung berarti memberikan gagasan, menyampaikan pikiran, dan memaparkan kehendak politik melalui media, baik media cetak seperti koran maupun media elektronik seperti siaran televisi. Media dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan politik (Hastangka & Farid, 2020). Selain media cetak dan media elektronik, masyarakat pun bisa berpartisipasi dalam politik melalui media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram* yang terkoneksi dengan internet. Dalam politik, internet telah memainkan peranannya dengan memudahkan masyarakat untuk aktif menyuarakan pendapat dan pandangan mereka yang berbeda terhadap pilihan politiknya (Rasul et al., 2015).

Perbedaan pilihan politik masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Perbedaan pilihan politik terjadi karena perbedaan status sosial, perbedaan strata ekonomi, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan budaya setempat, dan perbedaan gender. Dari beberapa perbedaan tersebut, perbedaan yang paling sensitif adalah perbedaan gender. Figur wanita masih dianggap tabu dalam perpolitikan karena dianggap kurang kompeten padahal Indonesia pernah dipimpin oleh presiden wanita dan sejak saat itu istilah "*eman sipasi*" semakin menguat menuntut kesetaraan gender dalam berbagai hal. Kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika dari semua pihak mau bersama-sama membangun perspektif gender yang benar (Febrianti, 2017). Artinya baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Persamaan hak politik antara laki-laki dan wanita adalah hak konstitusional yang diberikan pada masing-masing individu. Hak konstitusional merupakan hak-hak

yang melekat pada setiap warga Negara yang dijamin, dilindungi, dan diatur dalam konstitusi negara Indonesia (Pattipeilohy et al., 2018).

Dengan terjaminnya hak konstitusional maka negara Indonesia bisa di klaim sebagai negara yang demokratis yang menganut sistem “*multi party*” atau multi partai yang artinya lebih dari dua partai politik. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi (Sitepu, 2016). Tanpa keberadaan partai politik yang berperan sebagai alat kontrol kekuasaan, maka Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara yang demokratis. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat (Radhitya, 2019). Artinya rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Sebagai contoh, rakyat bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya saat pemerintah Indonesia akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, karena desakan rakyat yang menolak pengesahan tersebut, maka pemerintah mengganti nomenklturnya menjadi RUUBPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Selain itu, bukti paling fenomenal yang mengatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah peristiwa 1998, dimana seorang presiden yang telah lama berkuasa bisa dengan legowo melepaskan jabatannya karena tuntutan rakyat. Tahun tersebut menjadi tonggak sejarah reformasi di Indonesia.

Penulis meyakini, sejak runtuhnya orde baru, masyarakat Indonesia tidak lagi terkekang dalam kehidupan politiknya dengan ditandai semakin banyaknya partai politik. Keberadaan partai politik harus sejalan dengan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat tahu peran, fungsi, dan kedudukan sebuah partai dalam kehidupan demokrasi. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk memberikan pedoman, bekal, dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia guna meningkatkan kesadaran

kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di bidang politik (Christina et al., 2015). Jika pendidikan politik tidak diterapkan kepada masyarakat, maka masyarakat akan buta terhadap politik yang nantinya akan berimbas pada sikap apatis, cuek, masa bodoh terhadap keberadaan partai politik. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa solusi dari pihak pemerintah maka angka golput akan semakin besar. Tingginya angka golput pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum patut diwaspadai (Helen, 2019).

Angka golput yang tinggi di masyarakat akan menghambat cita-cita demokrasi negara Indonesia. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya (Setiawan, 2014). Berpartisipasi berarti turut serta secara sukarela dan tanpa adanya intimidasi atau perasaan terpaksa dalam melakukan suatu hal. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menekan angka golput. Dengan demikian kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan semakin meningkat (Arditama & Lestari, 2020).

Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu (Suharyanto, 2014). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik mutlak dilakukan meskipun saat pandemi covid-19 masih berlangsung. Terbukanya partisipasi politik merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik (Arief, 2010). Dengan semakin terbukanya sikap politik masyarakat maka akan menghasilkan pemimpin yang demokratis yang akan menjamin kesamaan hak dan kewajiban masyarakatnya. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik akan berdampak pada kesamaan hak dan kesempatan dalam pelaksanaan pemilihan langsung (Arwiyah, 2012).

Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan

dicitakan (Yanuar, 2017). Lain halnya jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan kedekatan kolega, maka aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik. Konsep antara partisipasi politik, keberadaan partai politik, dan pelaksanaan pemilihan secara langsung hanya bisa diajarkan kepada masyarakat melalui pendidikan politik. Disinilah peran dan kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik (Hemafitria, 2015). Indikator sebagai warga negara yang baik dapat terlihat dari peran dan partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membahas ranah kognitif nya saja atau hanya berupa pengetahuan mengenai teori-teori politik. Akan tetapi Pendidikan Kewarganegaraan juga dikenal sebagai pendidikan nilai dan moral (Nurgiansah, 2019). Artinya Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menginginkan warga negaranya baik secara teori saja akan tetapi secara praktis pun perlu diterapkan dengan sebaik-baiknya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab, sehingga mampu mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis (Dewi, 2018). Masyarakat yang demokratis berarti masyarakat yang bersedia dan mau menerima perbedaan pandangan politik sehingga rasa tanggungjawab masyarakat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya partisipasi politik masyarakat di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. *Qualitative research was a research that used a naturalistic approach to search for*

and find an understanding of phenomena in a particular setting (Nurgiansah et al., 2020). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik atau apa adanya untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang suatu fenomena tertentu yang terjadi. Dalam hal ini fenomena tersebut adalah partisipasi politik di masa pandemi. Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah (Nurgiansah & Widyastuti, 2020).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran penelitiannya yaitu sebagian masyarakat yang tinggal di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sleman yang terdiri dari Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi yakni pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Kabupaten Sleman yang akan melaksanakan pemilihan Bupati periode 2020-2025 dengan 3 pasangan calon. Lalu wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Sleman. *The interview is a data collection with a path of question and answer that is conducted systematically and based on the purpose of the investigation, to obtain the complete data, clear and precise the author held the question and answer to the official or the competent* (Nurgiansah, 2020). Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan harapan mendapatkan jawaban yang sistematis agar dapat menjawab tujuan penelitian karena bersumber dari informan yang kredibel. Kemudian dokumentasi berupa pengambilan gambar dan rekaman. Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan pada data yang bersifat tulisan, lisan, maupun gambar (Basahona

& Muhammad, 2018). Instrumen pengumpulan data yang terakhir adalah studi literasi dengan menggunakan artikel-artikel hasil penelitian terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Rabu 9 Desember 2020 saat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun karena Pilkada serentak ini sebelumnya juga sempat tertunda, maka tidak ada pilihan lain selain harus menggelar Pilkada di tengah pandemi.

Pilkada kali ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya karena digelar dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi kerumunan warga agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus.

Meskipun pandemi covid-19 sedang berlangsung, hal ini tidak menyurutkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam menyalurkan suaranya. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan dan mayoritas memenangkan pasangan Kustini Danang Maharsa sebagai Bupati Kabupaten Sleman. Berikut ini rekapitulasi suaranya:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati Sleman 2020-2025

No.	Kecamatan	Danang Wicaksana Agus Kholik	Sri Muslimatun Amin Purnama	Sri Kustini Danang Maharsa	Golput/Tidak Sah
1.	Berbah	8.411	10.124	10.577	4
2.	Cangkringan	4.565	6.124	7.345	11
3.	Depok	15.942	15.185	21.534	12
4.	Gamping	12.409	16.802	17.922	7
5.	Godean	10.235	12.486	15.663	4
6.	Kalasan	10.191	14.233	17.145	4
7.	Minggir	4.606	5.906	8.424	6
8.	Mlati	9.580	9.186	10.742	12
9.	Moyudan	5.676	6.921	7.467	2
10.	Ngaglik	16.212	12.999	16.240	20
11.	Ngemplak	11.092	10.005	10.677	15
12.	Pakem	5.563	6.829	9.333	5
13.	Prambanan	11.278	7.815	11.584	4
14.	Seyegan	9.580	9.186	10.742	6
15.	Sleman	14.601	10.001	15.028	4
16.	Tempel	12.009	6.909	13.846	7
17.	Turi	7.184	7.073	7.857	3
Jumlah Suara		169.134	167.784	212.126	126

Sumber: pilkada2020.kpu.go.id diakses 24-12-2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sleman sangat baik di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupan (Morgan, 2019). Keinginan memiliki figur atau sosok bupati yang tepat menjadikan masyarakat Kabupaten

Sleman tidak terpengaruh dengan adanya pandemi. Mereka beranggapan sudah terbiasa beraktivitas seperti biasanya karena hal yang terpenting adalah menjaga imunitas tubuh agar tidak terpapar virus. Mereka juga berkeyakinan bahwa dengan turut berpartisipasi dalam politik di tengah pandemi dapat meningkatkan imunitas karena berpandangan positif dan menghilangkan kekhawatiran berlebih

terhadap penularan virus.

Partisipasi politik yang tinggi di negara demokrasi pada umumnya dianggap baik karena menunjukkan bahwa warga negara aktif mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut (Setiawaty, 2014). Masyarakat Kabupaten Sleman sangat aktif melibatkan diri dalam kegiatan Pilkada ini. Dimulai dengan mengawal proses pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut, partisipasi di masa kampanye, turut serta mengawal pemungutan suara, sampai terpilihnya pemenang.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah bahwasanya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya tidak terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Salah satu partisipasi tersebut dapat terlihat saat pelaksanaan kampanye dan pencoblosan sehingga kehidupan yang demokratis dan sikap sportivitas tetap terjaga. Partisipasi masyarakat Sleman yang tetap terjaga dengan baik tidak terlepas dari peran partai politik. Setiap partai politik berlomba untuk menunjukkan sikap leadership yang kharismatik, citra yang baik agar dapat menarik masa dukungan (Damanhuri et al., 2017). Kehadiran partai politik yang melakukan kampanye dari akar bawah disinyalir menjadi salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat Sleman.

Jika dikaitkan dengan konteks Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi masyarakat Sleman yang tinggi merupakan perwujudan dari indikasi warga negara yang baik yang merupakan muara dari pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini. Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar

sampai perguruan tinggi (Bunyamin, 2008).

Isi dari konten Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pembelajaran yang membimbing bentuk sadar masyarakat dari bergunanya kehidupan bernegara serta menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air (Mellynia et al., 2020). Kecintaan terhadap tanah air merupakan hal yang penting dalam menjaga keutuhan Negara republik Indonesia dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang menerpa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan juga sangat banyak, selain sebagai pendidikan moral, Pendidikan Kewarganegaraan juga sebagai pendidikan politik. Artinya kegiatan politik di masyarakat terkristalisasi dalam isi materi ajarnya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian politik tidak berorientasi untuk mendukung rezim atau kekuatan politik tertentu (Aulia & Arpanudin, 2019). Dengan demikian kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan berada di titik tengah tanpa memihak salah satu calon pasangan tertentu.

Selain peran dari Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi politik masyarakat juga dipengaruhi oleh peran keluarga, pergaulan di lingkungan, dan peran media masa baik cetak maupun media elektronik. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan politik sebelum anak tersebut terjun ke lingkungan masyarakat. Dalam keluarga terjadi proses pembelajaran dari peran orang tua dalam mengenalkan pemahaman politik terhadap anak, seperti meminta pendapat anak, menyuruh anak memilih dan menentukan diantara dua pilihan, dan belajar menerima perbedaan keinginan. Kegiatan-kegiatan tersebut lambat laun akan membentuk kepribadian anak yang demokratis dan partisipatif.

Selanjutnya peran pergaulan di

masyarakat dapat menentukan sikap partisipasi politik seperti mengikuti organisasi karang taruna, ikut melaksanakan kerja bakti, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan di tingkat RT sampai kelurahan. Keaktifan dalam kegiatan tersebut akan membentuk partisipasi masyarakat di bidang politik. Peran yang terakhir adalah keberadaan media masa. Seperti kita ketahui bersama, di era globalisasi sekarang ini, arus informasi sangat mudah dan cepat didapatkan sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak melek politik dan tidak tahu perkembangan politik yang sedang terjadi. Apalagi ditambah dengan keberadaan internet dan media sosial, semakin mempermudah akses dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan terhadap perkembangan politik.

SIMPULAN

Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sleman dalam pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 di masa pandemi Covid-19 sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah partisipasi pemilih yang lebih banyak daripada suara yang golput maupun suara yang tidak sah. Di masa pandemi ini pelaksanaan pemilihan umum berbeda dari biasanya seperti keharusan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Masyarakat Sleman menilai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan politik yang mujarab untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik sebagai salah satu indikator menjadi warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 157–167. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Arief, U. (2010). Mencipakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2), 139–147. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v3i2.645>
- Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 85–92. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.342>
- Atmaja, T. S., Sulistyarini, & Dewantara, J. A. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 29–37.
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Basahona, H., & Muhammad, S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Geocivic*, 1(1), 56–61. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v1i1.861>
- Bunyahmin, M. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUCATIONIST*, II(2), 134–144.
- Christina, D., Nindastu, P. I., & Lubis, D. (2015). Alternatif Media Pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun Partisipasi Politik Pemuda Tani. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 13–29.
- Damanhuri, Rahman, I. N., & Juwandi, R. (2017). Kajian Tentang Peran Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan

- Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Pilkada Banten. *UCEJ: Untirta Civic Education Journal*, 2(1), 168–181.
- Dewi, U. (2018). Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pembelajaran PKn Di Tengah Arus Globalisasi. *Jurnal EL-Harma (Kependidikan Dan Kemasyarakatan)*, 3(3), 23–28. <http://ejournal.el-hamra.id/index.php/el/article/view/48>
- Febrianti, N. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*, 306–310.
- Hastangka, & Farid, M. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan Dalam Merespons Isu Global : Studi Kasus Covid-19. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–13.
- Helen. (2019). Dampak Perolehan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Remaja Dalam Pemilihan Umum. *Journal of Civic Education*, 2(2), 1–14.
- Hemafitria. (2015). Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 175–189.
- Januar Mahardhani, A. (2020). Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 65–76. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>
- Krisnawati, D., Mey, E., & Trisiana, A. (2020). Ketahanan Negara Republik Indonesia Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah*, 9(1), 51–62.
- Mellynia, R., Trisiana, A., Viyani, N. N., Safitri, F., & ... (2020). Bersatu Melawan Covid 19 Dengan Hidup Sehat Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah*, 9(1), 24–38. <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/3882>
- Morgan. (2019). Partisipasi Politik Komunitas Samin Bidang Pendidikan. *Jurnal Forum Tarbiyah*, 7(2), 229–244.
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan*, 1(1), 95–102.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Build An Attitude of Nationalism Students At SDN 7 KADIPATEN With The Method of Discussion In The Subject PPKn. *Jurnal Serunai Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP Budi Daya Binjai*, 9(1), 1–11.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi Universitas Muhammadiyah Makasar*, 5(2), 110–121.
- Nurgiansah, T. H., & Sukmawati. (2020). Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 17(2), 139–149.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY Dalam Berlalu Lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pasundan*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N., & Handayani, T. (2018). ANALISIS DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

- POLITIK PEMILIH PEMULA DI SMAN 1 BALAURING LEMBATA NTT. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 128-137. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8653>
- Radhitya, K. (2019). Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi. *Prosiding Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 251–257.
- Rasul, N., A. Rahim, S., & Salman, A. (2015). Penggunaan Media, Norma Kewarganegaraan Dan Partisipasi Politik Dalam Era Transisi Ke Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 31(1), 187–204. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2015-3101-10>
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 61–72. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis%0Ahttps://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/viewFile/2285/1967>
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Jurnal Islamic Review*, 3(1), 117–146.
- Sitepu, E. (2016). Peranan Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1), 1–8.
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 151–160.
- Yanuar, D. H. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilukada Kab. Trenggalek Tahun 2015 di Desa Kandelrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Rontal Keilmuan PPkn*, 3(1), 54–60. <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/983/478>